



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU**

GEDUNG B
BANDARA FATMAWATI SOEKARNO
JL. RAYA PADANG KEMILING KM 14,
KOTA BENGKULU (38213)

Telp : (0736) 8052010
Fax : (0736) 8052010

e-mail : bptdbengkulu@gmail.com
@ : @bptd_bengkulu

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III BENGKULU**

NOMOR : KP – BPTD.BKL 31 Tahun 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputtusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu untuk menetapkan :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Menyusun Laporan Kinerja;
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diatur sebagai berikut :
- Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- KELIMA : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA BALAI,



TAUFIK ERFIN, A.Md LLASD.,SE.,ST.,MM
NIP. 19830822 200912 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Sekretaris Ditjen. Perhubungan Darat;
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di terminal tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	88
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Nilai	81
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

KEPALA BALAI,



TAUFIK ERFIN, A.Md LLASD.,SE.,ST.,MM
NIP. 19830822 200912 1 003

**MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN 2025**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintasan Angkutan Jalan Nasional
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintasan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek Perintis yang dilayani terhadap jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan dalam pelayanan angkutan perintis adalah tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan, untuk masing – maisng trayek dapat dilihat pada tabel berikut : Provinsi Bengkulu 1. Banjar Sari – Kahyapu (P. Enggano); 2. Muara Aman – Curup – Simpang Nangka; 3. Bengkulu – Kerkap – Argamakmur – Muara Aman; 4. Bengkulu – Ulu Manna (Trayek Baru); 5. Bengkulu - Kaur			
SUMBER DATA			
• Direktur Angkutan Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu • Tim Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Realisasi Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}}{\text{Rencana Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}} \times 100 \%$			
SATUAN			
% (persentase)			
TARGET			
2025			
100			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Sarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi
DEFINISI			
Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dihitung berdasarkan jumlah terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi. BPTD Kelas III Bengkulu memiliki 1 (Satu) Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe A Simpang Nangka, dan 1 (satu) Terminal yang tidak beroperasi yaitu Terminal Air Sebakul. Terminal Tipe A Simpang Nangka merupakan terminal induk dimana merupakan terminal asal – tujuan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong yang melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).			
SUMBER DATA			
• Direktorat Prasarana Angkutan Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu • Tim Prasarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan • Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Nangka			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah Total Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi			
SATUAN			
Lokasi			
TARGET			
2025			
2			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Prasarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis
DEFINISI			
Persentase Pelaksanakan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek Perintis yang dilayani terhadap jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan dalam pelayanan angkutan perintis adalah tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan, untuk masing – maisng trayek dapat dilihat pada tabel berikut : Provinsi Bengkulu Bengkulu – Enggano.			
SUMBER DATA			
• Direktur Angkutan Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu • Tim Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Realisasi Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}}{\text{Rencana Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}} \times 100 \%$			
SATUAN			
% (persentase)			
TARGET			
2025			
100			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Sarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan Kelas I, II, III. Sedangkan pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan pengumpulan dan pengumpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Bengkulu terdapat Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai dan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Enggano.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Prasarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan - Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah Total Pelabuhan yang sudah beroperasi			
SATUAN			
Lokasi			
TARGET			
2025			
2			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu			
Tim Prasarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A
DEFINISI			
BPTD Kelas III Bengkulu memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A dihitung berdasarkan perbandingan jumlah terminal Tipe yang kondisinya baik terhadap jumlah Terminal Tipe A.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Prasarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan - Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Nangka			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Jumlah Terminal yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Terminal yang dipantau}}$			
SATUAN			
% (persentase)			
TARGET			
2025			
55			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Prasarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
DEFINISI			
BPTD Kelas III Bengkulu memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelabuhan yang kondisinya baik terhadap jumlah Pelabuhan SDP.			
Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :			
Jenis Pemeriksaan		Uraian	
1. SPM Pelayanan Penumpang		Aspek Keselamatan	
2. SPM Pemuatan Kendaraan		Aspek Keamanan	
3. SPM Pengoperasian Kapal		Aspek Kenyamanan	
		Aspek Kemudahan / Keterjangkauan	
		Aspek Kesetaraan	
		Aspek Keteraturan	
SUMBER DATA			
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Prasarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan - Satuan Pelayanan Pelabuhan Pulau Baai			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}}$			
SATUAN			
% (persentase)			
TARGET			
2025			
88			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu			
Tim Prasarana Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang
DEFINISI			
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 11 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 11 (Sepuluh) item dimaksud meliputi : 1) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas; 2) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Putih; 3) Pengadaan dan Pemasangan APJ; 4) Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail; 5) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Wisata Pantai; 6) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Kecepatan; 7) Pengadaan dan Pemasangan WL Tenaga Surya; 8) Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan; 9) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron; 10) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Type 2(Terminal End); 11) Pengadaan dan Pemasangan Deliniator Pipa Besi.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu • Tim Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Jalan di Provinsi Bengkulu}}{\text{Jaringan Jalan Nasional Bengkulu berdasarkan KP 290/ KPTS /M/2015}}$			
SATUAN			
% (persentase)			
TARGET			
2025			
20			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Tansportasi Jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan Pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan Pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah Orang / Masyarakat yang tersosialisasi			
SATUAN			
Orang			
TARGET			
2025			
2000			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
DEFINISI			
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Jumlah UPPKB yang terakreditasi di Provinsi Bengkulu}}{\text{Jumlah Total UPPKB di Provinsi Bengkulu}} \times 100\%$			
SATUAN			
% (Persentase)			
TARGET			
2025			
74,8			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tim Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
DEFINISI			
Sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat maka telah ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan Kinerja Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat. Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2024 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : 1. Penyusunan bahan RKA; 2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD; 3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat; 4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; 5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru; 6. Kalibrasi alat uji; 7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun; 8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Bengkulu; 9. Pengawasan Gakum; 10. Pengiriman Pegawai Diklat; 11. Penyidikan dan Pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009; 12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ.			
SUMBER DATA			
• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu • Tim Tata Usaha			
CARA MENGHITUNG			
$\frac{\text{Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat}}{\text{Target Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat}} \times 100\%$			
SATUAN			
Nilai			
TARGET			
2025			
81			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu			
Tim Tata Usaha			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu pada Tahun 2024. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.			
SUMBER DATA			
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu - Tim Tata Usaha			
CARA MENGHITUNG			
1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi $\frac{\text{Jumlah Meja dan Kursi di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$			
2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Komputer $\frac{\text{Jumlah Komputer di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$			
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet $\frac{\text{Rata - Rata Kecepatan Internet di Kantor}}{\text{Standar Kecepatan Internet di Kantor}} \times 100\%$			
SATUAN			
Nilai			
TARGET			
2025			
84			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu			
Tim Tata Usaha			



KEPALA BALAI,

TAUFIK ERFIN, A.Md LLASD.,SE.,ST.,MM

NIP. 19830822 200912 1 003

BPTD KELAS III BENGKULU

- IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan Jalan
- IKK 1.3 Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi
- IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Penyeberangan
- IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi
- IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A
- IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
- IKK 3.1 Persentase perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
- IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan
- IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
- IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan teknis transportasi darat
- IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat



TAUFIK ERFIN, A.Md LLASD.,SE.,ST.,MM
NIP. 19830822 200912 1 003